LAPORAN

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN 3

TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

LAPORAN

SURVEI
PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS

TRIWULAN III

TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Makassar
Pada Hari Jumat, 30 September 2022

Top Management,

SIGID TRIYONO, S.H, M.H.
NIP. 196504121992121001

Sekretaris Tim Survei,

ALID BURHAN, S.H.
NIP. 197005201993031003

Ketua Tim Survei,

RUSDIYANTO LOLEH, S.H.,M.H.
NIP. 197009141996031001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN **2**

BAB I **4**

PENDAHULUAN **4**

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Maksud Dan Tujuan 5

1.3. Landasan Hukum 5

1.4. Rencana Kerja 6

BAB II 8

METODOLOGI **8**

2.1. Metode Penelitian 8

2.2. Populasi Dan Sampel 8

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 8

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control 9

2.5. Teknik Analisis Data 9

2.6. Tahapan pelaksanaan 10

BAB III 1

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI **1**

3.1. Profil Responden 1

3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator 5

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan 16

3.4. Analisa dan Tindak Lanjut 17

PENUTUP **19**

4.1. Kesimpulan 19

4.2. Rekomendasi 20

LAMPIRAN-LAMPIRAN **20**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28

b) Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

c) Undang-Undang Nomor 31 Tah

d) un 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

i) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

  Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimiliki Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
- Penyiapan Bahan

  Dengan menyiapkan fasilitas untuk pengambilan survei secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER)
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  a. Jumlah Responden, target responden khusus pengguna layanan utama pengadilan adalah sebanyak 198 responden
  b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
     - Lokasi pengumpulan data terpusat pada lingkungan Pengadilan Negeri Makassar yaitu

pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- Waktu pengumpulan dilakukan mulai bulan Juli dan berakhir pada bulan September 2022

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Pengumpulan data dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER)
- Data pendapat responden yang terisi dalam Aplikasi kemudian disajikan dalam bentuk Laporan.

1.4.3. Metode Survei

Metode Survei dilakukan dengan menggunakan ***Teknik Sampel Morgan dan Krejcie***.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik ***Teknik Sampel Morgan dan Krejcie***. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan sebanyak **197** sampel diperoleh sesuai dengan Tabel Sampel Morgan dan Krejcie (Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar

didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi melalui Aplikasi Survey Pelayanan Masyarakat (SISUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau sampel minimal 197 (seratus sembilan puluh tujuh) responden.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Ketua dan Sekretaris Tim Survei, untuk mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, mendampingi pengisian Aplikasi Survei, meneliti Aplikasi Survei sekaligus memastikan responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas dan bertanggungjawab terhadap hasil perhitungan survei Persepsi Anti Korupsi.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan

indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas

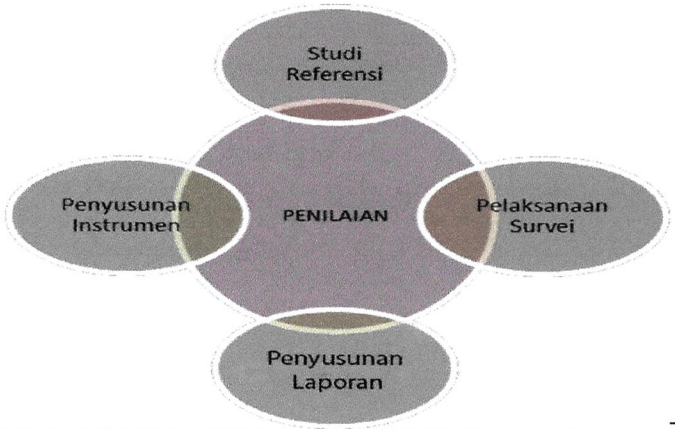

Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 2.5996	25 – 64.99	1	Tidak bersih dari korupsi
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	2	Kurang bersih dari korupsi
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar mayoritas sebanyak **62,43 %** memiliki latar **Sarjana (S1)**.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

Nomor	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP/SLTP	4	2,03
4	SLTA	34	17,25
5	Diploma (D1/D2/D3/D4)	8	4,06
6	Sarjana (S1)	123	62,43
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	28	14,21
Jumlah		197	100

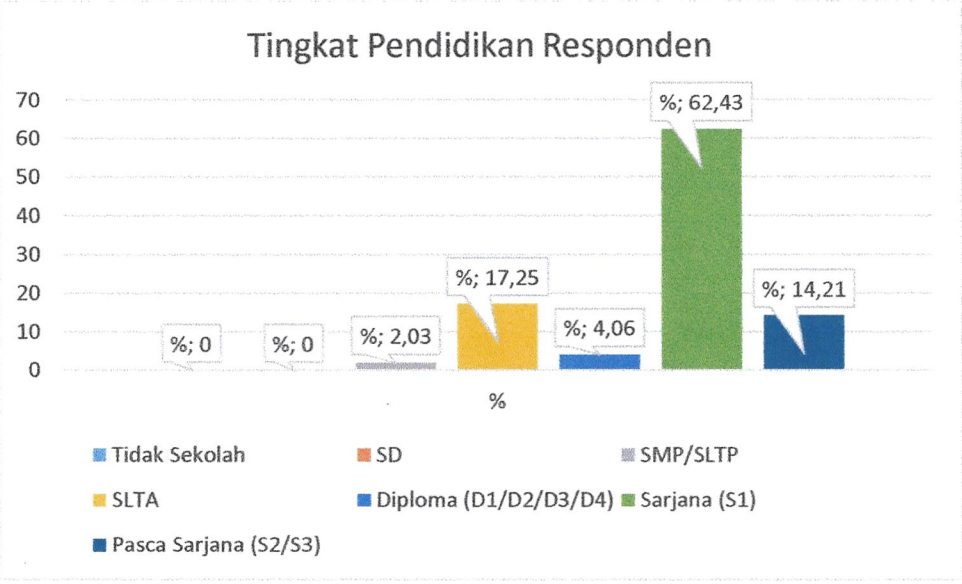

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **55,83 %** responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar mememiliki pekerjaan **Lainnya**.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

Nomor	Pekerjaan	Frekuensi	%
1	PNS	9	4,56
2	TNI	1	0,50
2	Polri	13	6,59
3	Swasta	43	21,82
4	Tenaga Kontrak	5	2,53
5	Wirausaha	16	8,12
6	Lainnya	110	55,83
Jumlah		197	100

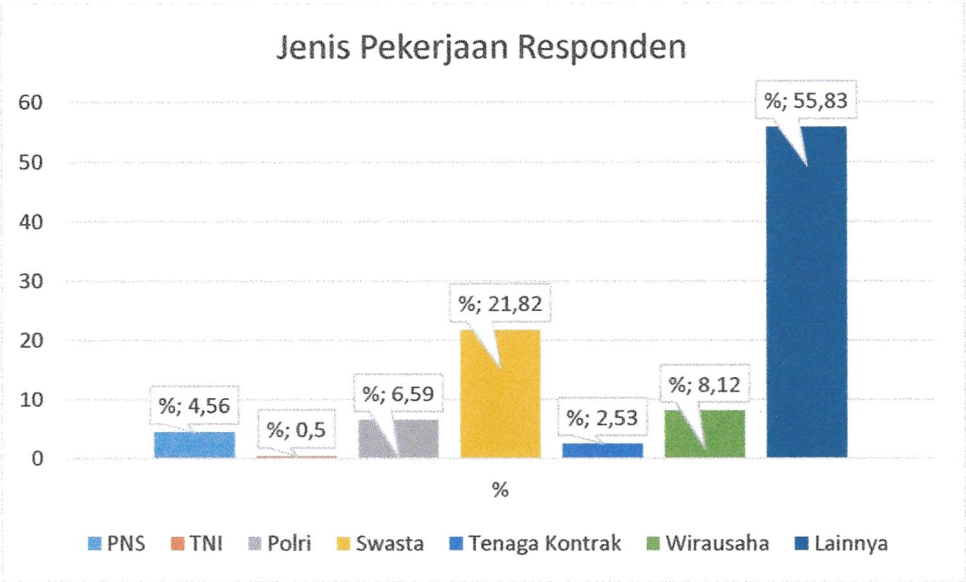

3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domilisi, responden paling banyak berasal dari **Sulawesi Selatan** dengan persentase 97,46%.

Tabel 6

Domisili Responden

No	Domisili	Frekuensi	%
1	Sulawesi Selatan	192	97,46
2	DKI Jakarta	2	1,01
3	Jawa Barat	1	0,50
4	Jawa Tengah	1	0,50
5	Kalimantan Selatan	1	0,50
Jumlah		197	100

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara **18 tahun s/d 28 tahun** sebanyak **38,07 %.** Bagi kelompok usia di atas 59 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 7.

Usia responden

Nomor	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	75	38,07
2	29-39	60	30,45
3	40-49	32	16,24
4	50-59	24	12,18
5	60-69	6	3,04
Jumlah		197	100

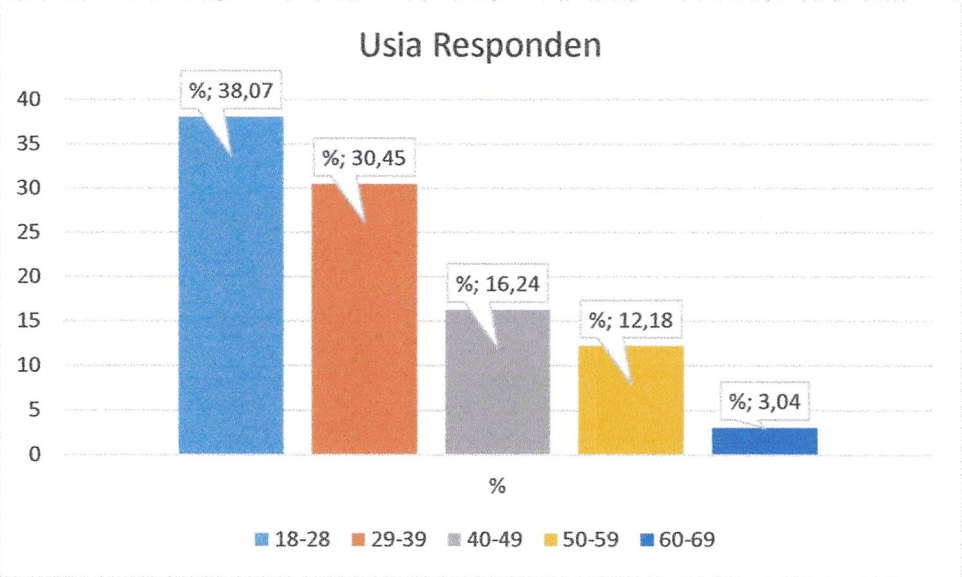

3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3,812** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari presepsi Korupsi terhadap manipulasi peraturan.

Tabel 9

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No	Manipulasi Peraturan	Frekuensi	%
1	Tidak Sesuai Prosedur	1	0,5
2	Jarang Sesuai Prosedur	1	0,5
3	Sering Sesuai Prosedur	32	16,24
4	Selalu Sesuai Prosedur	163	82,74
Jumlah		**197**	**100**

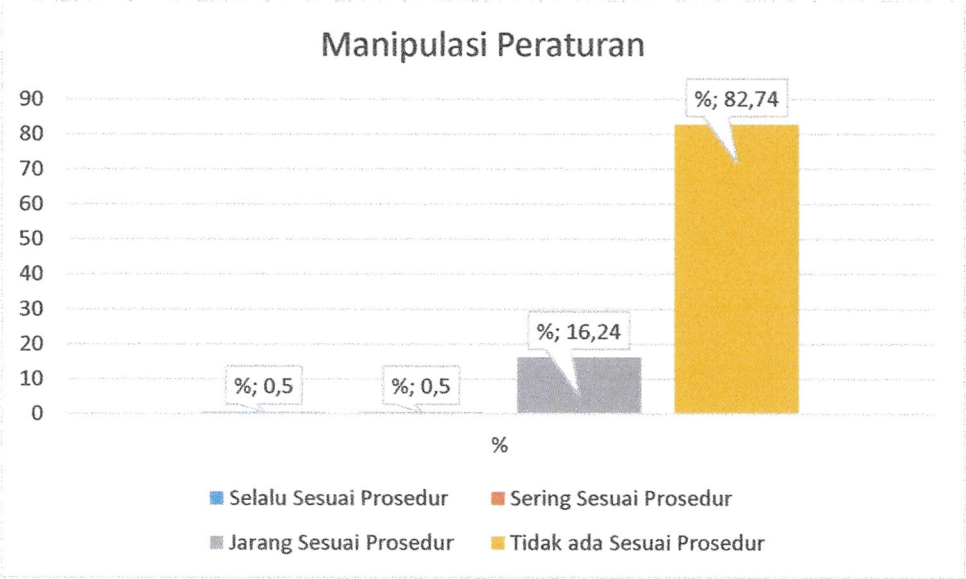

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, presepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3,909**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Penyalahgunaan Jabatan	Frekuensi	%
1	Petugas melayani Selalu Meminta Imbalan	0	0
2	Petugas melayani Sering Meminta Imbalan	4	2,03
3	Petugas melayani Jarang Meminta Imbalan	10	5,07
4	Petugas melayani Tanpa Meminta Imbalan	183	92,89
Jumlah		**197**	**100**

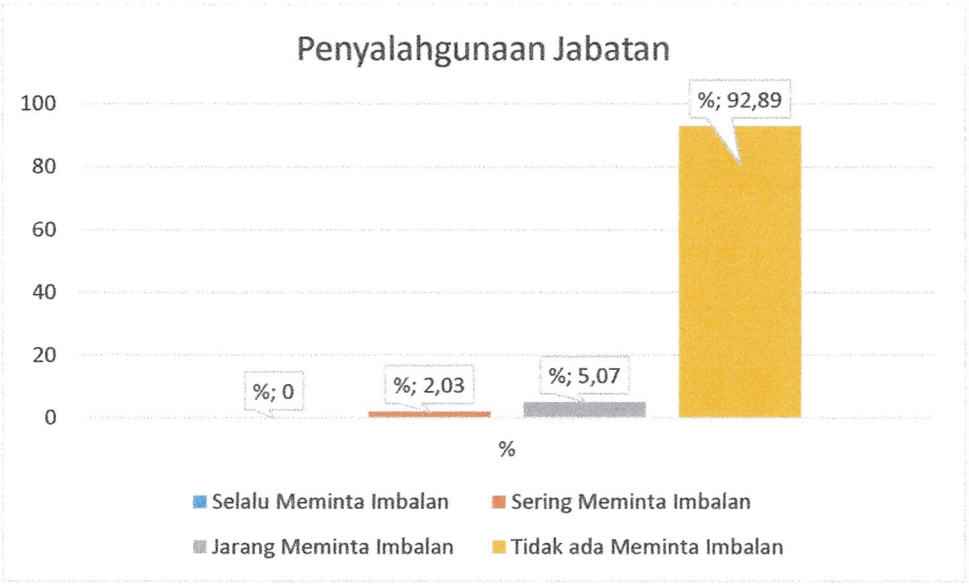

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3,888**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No	Menjual Pengaruh	Frekuensi	%
1	Selalu	1	0,5
2	Sering	4	2,03
3	Jarang	11	5,58
4	Tidak ada	181	91,87
Jumlah		**197**	**100**

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada inidikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,751**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan keterbukaan publik dengan transaksi Biaya di Meja PTSP, Website, Pamflet dan Banner

Tabel 12.

Indeks pada indikator transaksi biaya

No	Transaksi Biaya	Frekuensi	%
1	Tidak Pernah	4	2,03
2	Jarang	5	2,53
3	Sering	27	13,70
4	Selalu	161	81,72
Jumlah		**197**	**100**

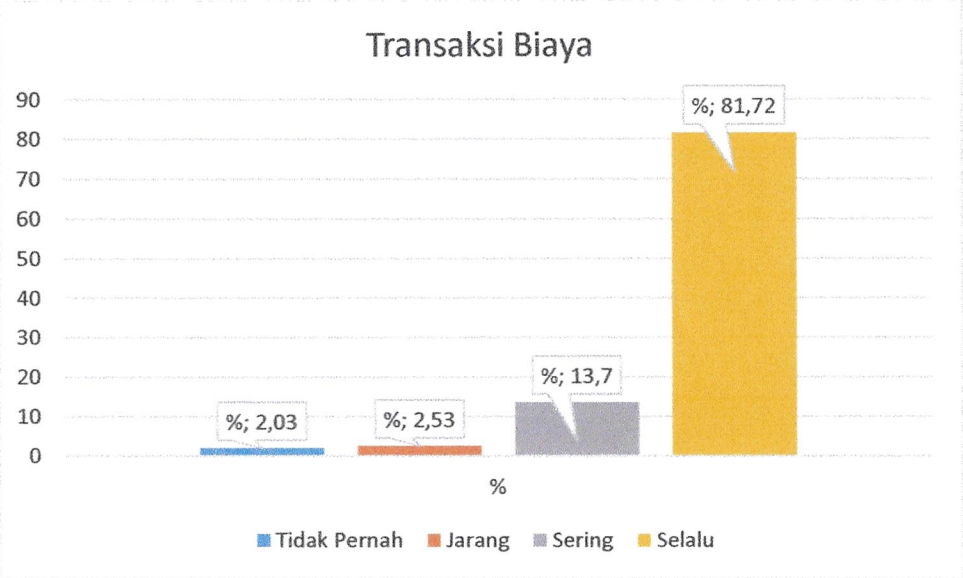

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,822**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar biaya pelayanan itu dapat dilihat di website, papan pengumuman, banner dan liftlet, sehingga tidak bisa meminta biaya tambahan yang diluar SK Ketua tentang panjar biaya perkara.

Tabel 14.

Indeks pada indikator tambahan biaya

No	Biaya Tambahan	Frekuensi	%
1	Tidak Pernah	6	3,04

2	Jarang	2	1,01
3	Sering	13	6,59
4	Selalu	176	89,34
Jumlah		**197**	**100**

176,13,2,6

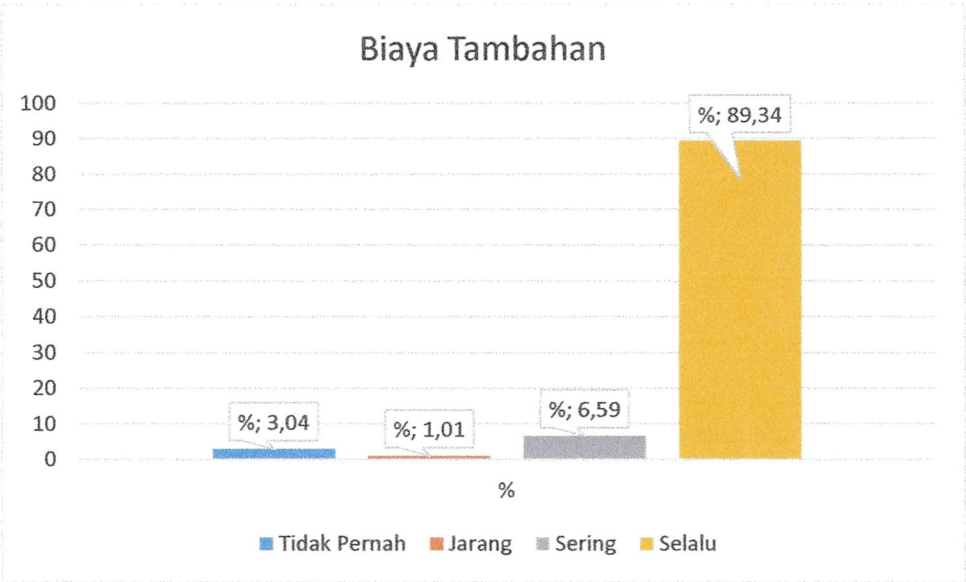

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3,838**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar tidak pernah menerima gratifikasi dan hadiah dalam bentuk apaapun juga, dan jika ada maka wajib melapor kepada Tim Gratifikasi Pengadilan Negeri Makassar.

Tabel 15.

Indeks pada indikator hadiah

No	Hadiah	Frekuensi	%

1	Selalu	2	1,01
2	Sering	7	3,55
3	Jarang	12	6,09
4	Tidak ada	176	89,34
Jumlah		**197**	**100**

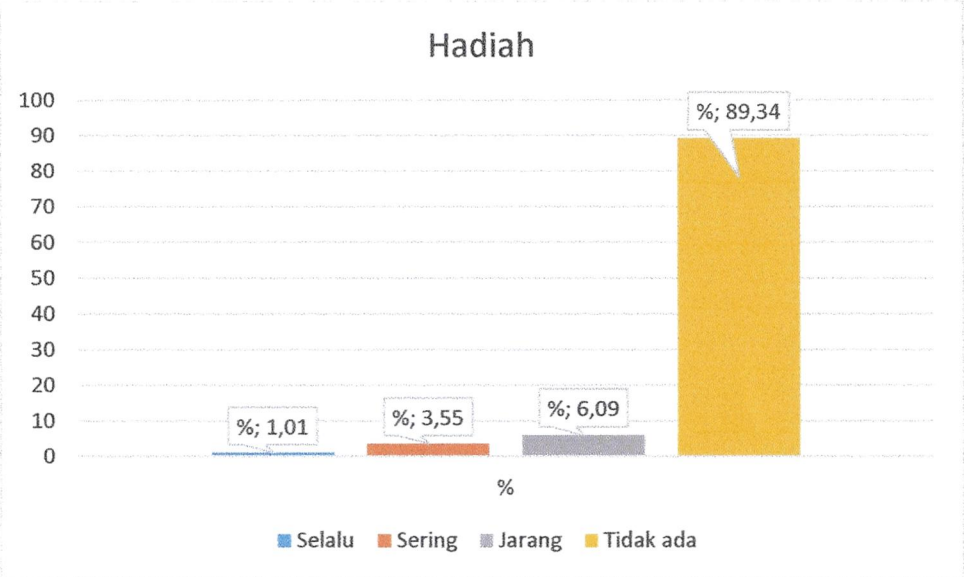

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Trsnsparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **3,853**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap Transparansi Biaya sudah transparan dengan adanya meja PTSP.

Tabel 16.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No	Transparasi Biaya	Frekuensi	%
1	Tidak Pernah	2	1,01
2	Jarang	4	2,03
3	Sering	15	7,61
4	Selalu	176	89,34
Jumlah		**197**	**100**

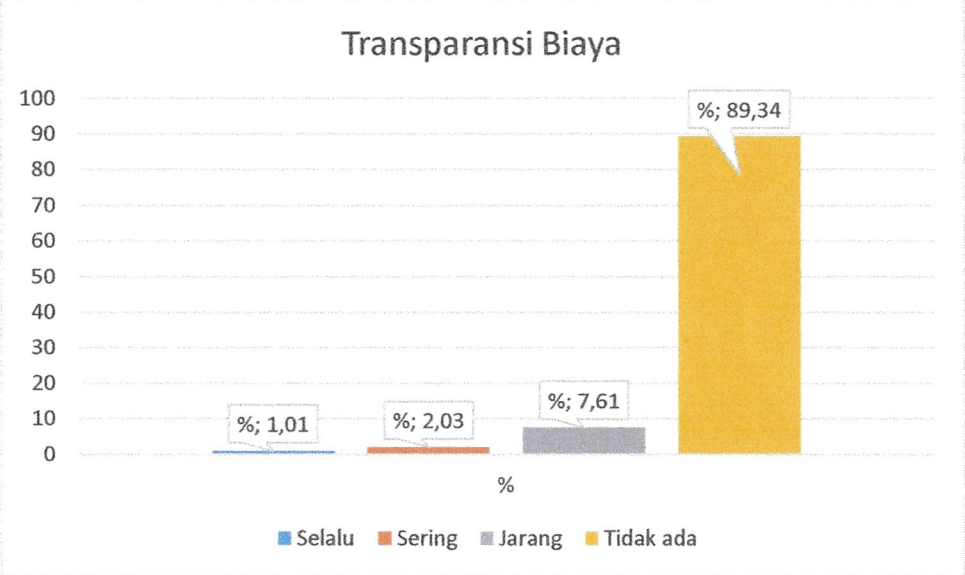

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,909**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari tindakan Percaloan. Terutama pada pengurusan Tilang, sudah tidak ada lagi praktik percaloan di Pengadilan Negeri Makassar.

Tabel 17.

Indeks pada indikator percaloan

No	Percaloan	Frekuensi	%
1	Selalu	0	0
2	Sering	3	1,52
3	Jarang	12	6,09
4	Tidak ada	182	92,38
Jumlah		**197**	**100**

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3,802**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari perbuatan curang.

Tabel 18.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No	Perbuatan Curang	Frekuensi	%
1	Selalu	4	2,03
2	Sering	7	3,55
3	Jarang	13	6,59
4	Tidak ada	173	87,81
Jumlah		**197**	**100**

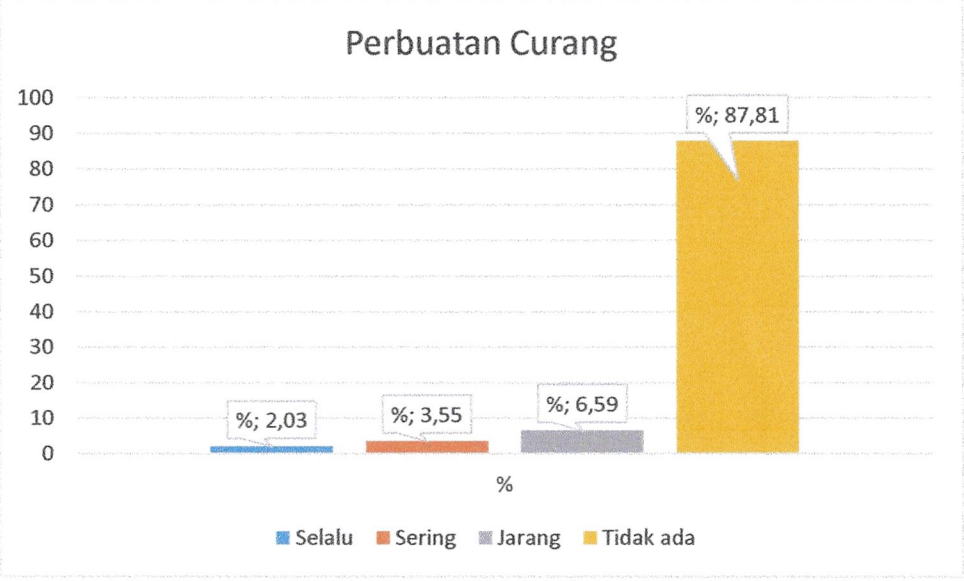

3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **3,893**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan pencegahan terhadap Transaksi Rahasia dengan meyiapkan meja PTSP dan pengawasan melekat.

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No	Transaksi Rahasia	Frekuensi	%
1	Selalu	3	1,52
2	Sering	3	1,52
3	Jarang	6	3,04
4	Tidak ada	185	93,90
Jumlah		**197**	**100**

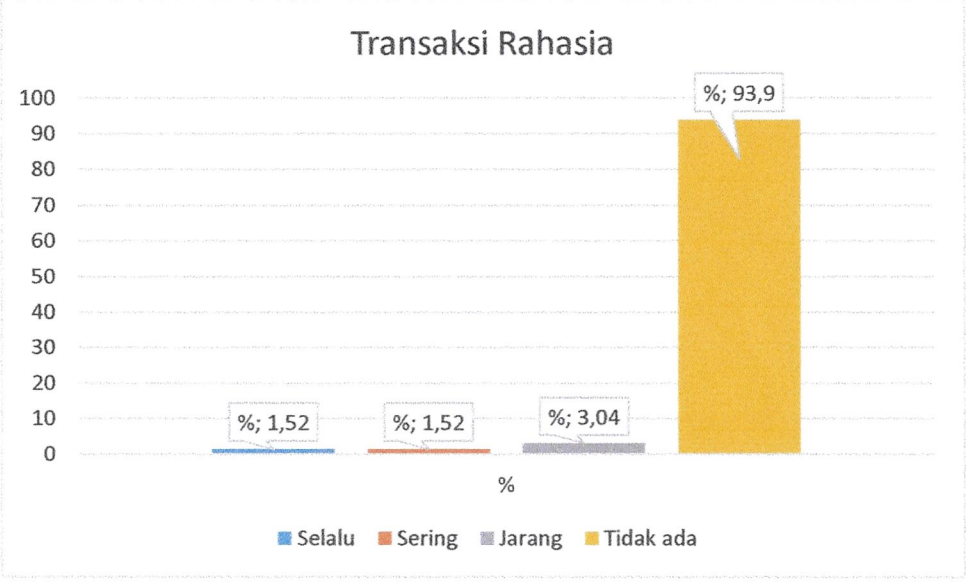

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar sebesar **3,85** atau bila dikonversikan adalah sebesar **96,19%**

Tabel 19.

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-

		rata
U1	Manipulasi Peraturan	**3,812**
U2	Penyalahgunaan Jabatan	**3,909**
U3	Menjual Pengaruh	**3,888**
U4	Transaksi Biaya	**3,751**
U5	Biaya Tambahan	**3,822**
U6	Hadiah	**3,838**
U7	Transparansi Biaya	**3,853**
U8	Percaloan	**3,909**
U9	Perbuatan Curang	**3,802**
U10	Transaksi Rahasia	**3,893**
	Total	
	Rata Rata	**3,848**

Indeks **3,85** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 4.

3.4. Analisa dan Tindak Lanjut

Hasil rata – rata Survey Persepsi Anti Korupsi terdapat 3 unsur terendah, dengan nilai ambang batas dibawah 3,7 yaitu :

No.	Ruang Lingkup	Indeks	Nilai
1	Transaksi Biaya	3,751	Sangat Baik
2	Perbuatan Curang	3,802	Sangat Baik
3	Manipulasi Peraturan	3,812	Sangat Baik

Berdasarkan analisa penyebab hasil Survey dengan 3 unsur terendah tersebut yaitu:

a. Transaksi Biaya
   Perlunya peningkatan pemahaman yang baik oleh Petugas PTSP tentang informasi tarif/biaya layanan kepada masyarakat

b. Manipulasi Peraturan

   Perlunya pemberian reward dan punishment kepada Petugas PTSP untuk menghindari dari segala bentuk perbuatan curang.

c. Perbuatan Curang
   Perlunya pemahaman yang baik mengenai prosedur dan ketentuan pelayanan yang berlaku oleh Petugas PTSP sebagai dasar dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Tindak Lanjut yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk meningkatkan unsur terendah tersebut yaitu:

1. Pelatihan dan sosialisasi dalam peningkatan mutu pelayanan meliputi SOP serta soft skill pelayanan lainnya kepada Petugas PTSP serta penerapan Reward dan Punishment
2. Meningkatkan pelayanan prima dengan memberikan pelatihan bagi petugas Pelayanan
3. Atasan langsung dari Petugas PTSP melakukan pembimbingan dan Mentoring secara berkala dalam upaya peningkatan kinerja Petugas PTSP

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Makassar memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,85 atau** masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,812**;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,909**;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,888**;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,751**;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,822**;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,838**;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,853**;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,909**;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,802**;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,893**;

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar Triwulan 3 Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa **mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,85 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi**.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

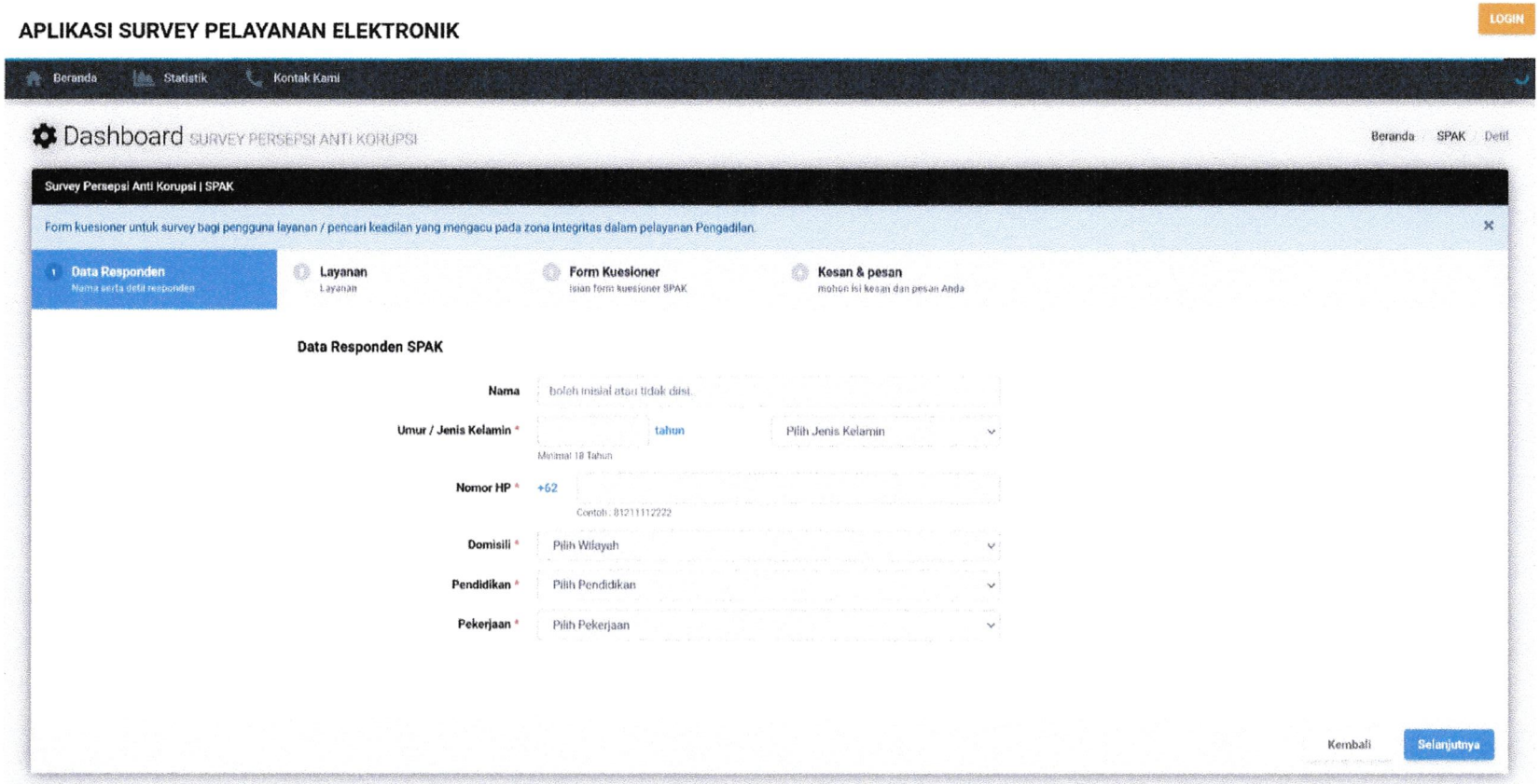

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
LOGIN
Beranda
Statistik
Kontak Kami
Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Beranda
SPAK
Detil
Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK
Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.
Data Responden
Nama serta detil responden
2 Layanan
Layanan
Form Kuesioner
Isian form kuesioner SPAK
Kesan & pesan
Inform isi kesan dan pesan Anda
Layanan yang Anda dapatkan
Jenis Layanan *
Pilih Layanan Yang Didapat
Pernah Menerima Layanan Ini Sebelumnya ? *
Pilih Layanan Yang Didapat
Kembali
Selanjutnya

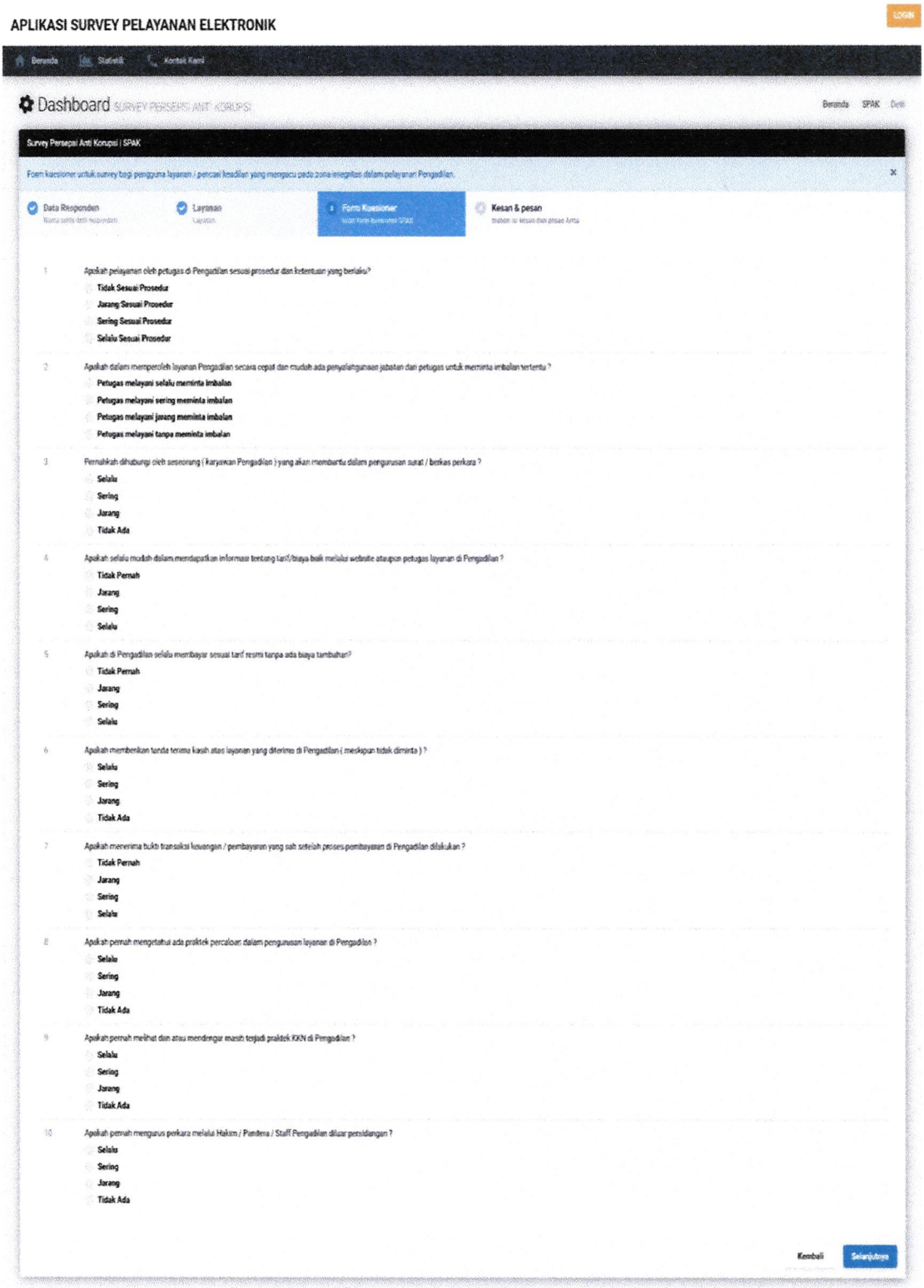
APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
LOGIN
Beranda
Statistik
Kontak Kami
Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Beranda SPAK
Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK
Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.
Data Responden
Layanan
Form Kuesioner
Kesan & pesan
1 Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
Tidak Sesuai Prosedur
Jarang Sesuai Prosedur
Sering Sesuai Prosedur
Selalu Sesuai Prosedur
2 Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dan petugas untuk meminta imbalan tertentu ?
Petugas melayani selalu meminta imbalan
Petugas melayani sering meminta imbalan
Petugas melayani jarang meminta imbalan
Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3 Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
4 Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
5 Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
6 Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
7 Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
8 Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
9 Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
10 Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
Kembali
Selanjutnya

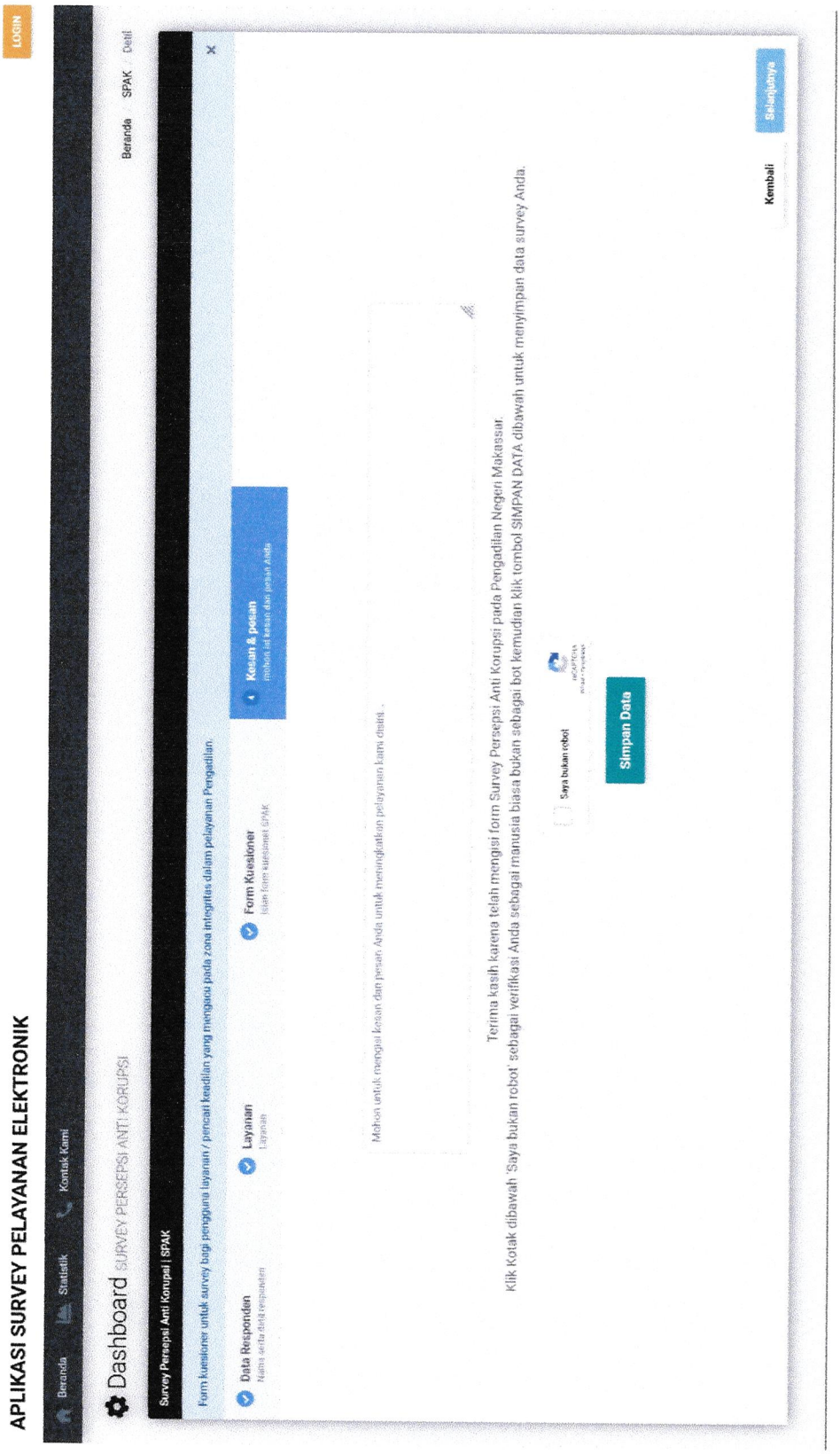
APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
LOGIN
Beranda
Statistik
Kontak Kami
Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Beranda SPAK Detil
Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK
Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.
Data Responden
Nama serta data responden
Layanan
Layanan
Form Kuesioner
Isian form kuesioner SPAK
Kesan & pesan
mohon isi kesan dan pesan Anda
Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami dsbnya .
Terima kasih karena telah mengisi form Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.
Klik Kotak dibawah 'Saya bukan robot' sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.
Saya bukan robot
Simpan Data
Kembali
Selanjutnya

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Jln. R.A. Kartini No. 16/23 KOTA MAKASSAR
SULAWESI SELATAN
http://www.pn-makassar.go.id/

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Juli 2022 sampai 30 September 2022

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,85 / 96,19%

Jumlah	197 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 142	
	PEREMPUAN : 55	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 0
	SD : 0	Diploma 3 : 5
	SMP : 4	S1 : 123
	SMU : 34	S2 : 23
	Diploma 1 : 3	S3 : 5
Pekerjaan	PNS : 9	SWASTA : 43
	TNI : 1	WIRAUSAHA : 16
	POLRI : 13	TENAGA KONTRAK : 5
	LAINNYA : 110	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :
1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,751
2. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? 3,802
3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3,812

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

4 Oktober 2022
Ketua
Pengadilan
Negeri

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

ASMAN ABNUR